



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN
KENDAL**



**KENDAL
-
I
N
C
L
U
S
I
V
E**

Jl. Pramuka No.1 Kendal
(0294) 381443



"Kelautan dan Perikanan Untuk Ketahanan Pangan"

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran yang diukur, dianalisis, dievaluasi, dan dijabarkan dalam bentuk laporan kinerja. LKjIP bertujuan menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan keberhasilan capaian sasaran saat ini. LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan optimalisasi pencapaian kinerja pada masa mendatang.

Kendal, 2026
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KENDAL

drh. HUDI SAMBODO
Pembina Utama Muda
NIP. 197205041999031009

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi | 2 |
| 1.3. Isu-Isu Strategis | 7 |
| 1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran | 8 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 11 |
| 1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 | 11 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD | 13 |
| 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan | 17 |
| 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 | 17 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 23 |
| 2.5. Instrumen Pendukung capaian Kinerja | 25 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 27 |
| 3.2. Efisiensi Anggaran | 54 |
| 3.3. Inovasi | 57 |
| 3.4. Penghargaan | 59 |
| BAB IV. PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | 62 |
| 4.2. Rekomendasi | 63 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab yang dituangkan dalam sistem akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas secara harfiah didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam rumusan birokrasi maka akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Instansi Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b) Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c) Sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diperlukan.

Sebagai pelaporan kinerja maka Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan program kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026. LKjIP disusun setelah berakhirnya tahun anggaran oleh perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai dari setiap instansi/unit kerja dalam menjalankan tujuan, tugas dan fungsi, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun. LKjIP disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Oleh karena itu penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal serta peningkatan hasil dan manfaat dibanding dengan tahun sebelumnya.

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dasar hukum keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219) dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.
- 3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.

- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
 - 6) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan.
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kelautan dan perikanan.
- c. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Perikanan Tangkap
 - 4) Bidang Perikanan Budidaya
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan.

c. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

- 2) Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perikanan Tangkap

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan tangkap.

b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan tangkap; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perikanan tangkap.

- c. Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas 3 sub koordinator yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap :

- 1) Sub Koordinator Kenelayanan
- 2) Sub Koordinator Produksi Perikanan Tangkap
- 3) Sub Koordinator Usaha dan Bina Mutu

Bidang Perikanan Budidaya

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan budidaya; dan

- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perikanan budidaya.
- c. Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas 3 sub koordinator yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya :
- 1) Sub Koordinator Produksi Perikanan Budidaya
 - 2) Sub Koordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - 3) Sub Koordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

UPTD Tempat Pelelangan Ikan

Secara khusus dasar hukum keberadaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

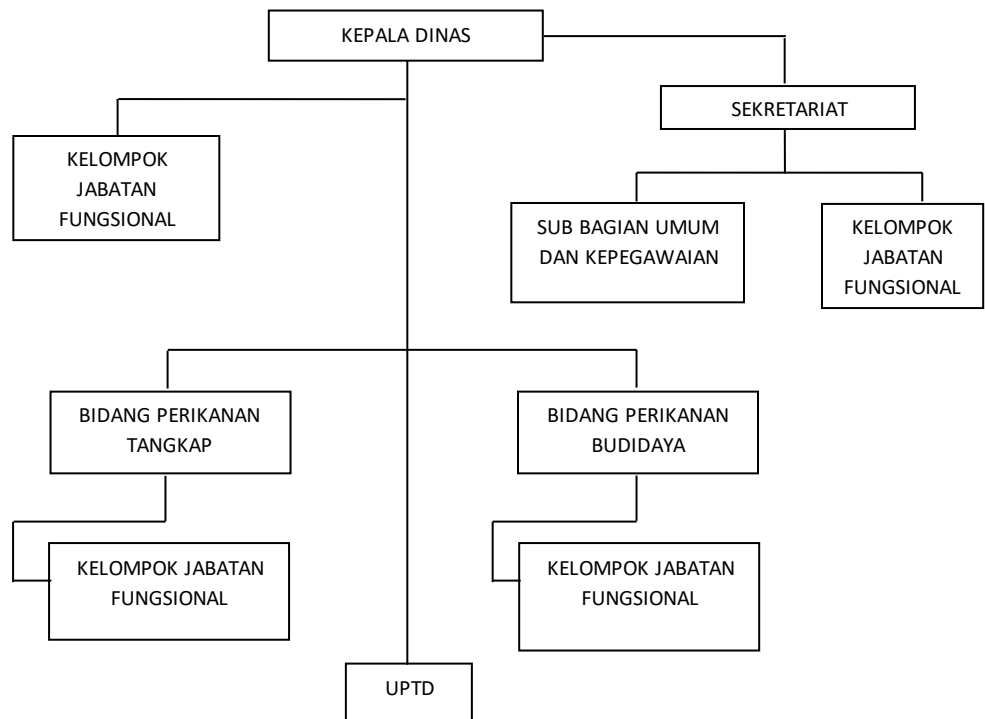
a. Tugas

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelelangan ikan.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- 2) pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- 3) pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi pelelangan ikan;
- 4) pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pengaturan tata kerja sesuai Peraturan Bupati dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan tugas-tugas internal organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, serta gambaran hirarki yang ada dalam organisasi. Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat utama pembangunan. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Reformasi birokrasi menjadi prioritas utama pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu area perubahan Reformasi Birokrasi yang harus disusun adalah Peta Proses Bisnis. Peta proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi untuk menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi

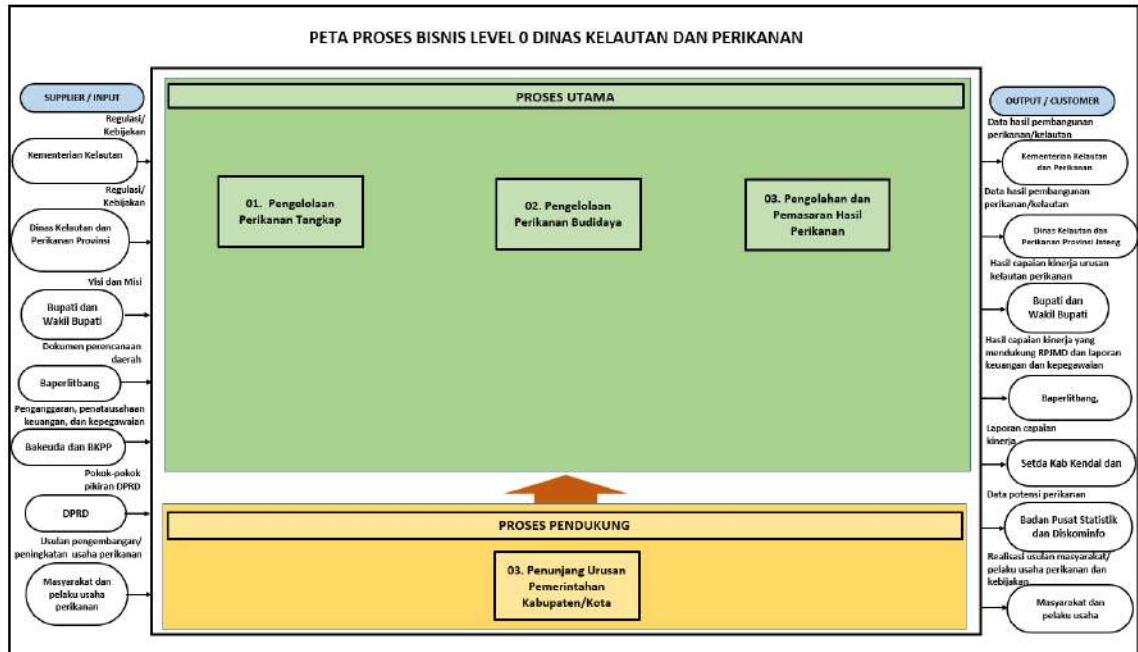
memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah agar perangkat daerah:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah perangkat daerah;
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.

Peta Proses Bisnis Level 0 yang telah disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal meliputi :

- a. Proses Utama, yang meliputi :
 - 1) Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 2) Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- b. Proses Pendukung, yang meliputi : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.



Gambar 1.2

Peta Proses Bisnis Level 0 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

1.3. Isu-Isu Strategis

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Semakin berkurangnya produksi perikanan budidaya
2. Kurangnya ketersediaan prasarana pelelangan hasil ikan
3. Harga pakan yang sangat fluktuatif dan cenderung meningkat setiap tahunnya
4. Tidak adanya pupuk bersubsidi (urea) untuk para pembudidaya ikan khususnya di tambak
5. Kurangnya kemampuan kelompok dalam penyediaan sarana budidaya maupun sarana penangkapan ikan
6. Semakin berkurangnya luas tambak karena alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun bencana abrasi
7. Rawan terjadinya banjir yang melanda areal tambak

1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia

Pada tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai sumber daya ASN sebanyak 62 pegawai, yang terdiri dari 28 orang PNS dan 30 orang PPPK, 4 orang PPPK Paruh waktu. Sedangkan tenaga non ASN sebanyak 17 orang sebagai Tenaga Outsourcing. Gambaran tentang potensi kepegawaian pada bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan, dan Golongan.

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|----------|
| A. | Jumlah pegawai (PNS/CPNS) | |
| | a. Pejabat struktural berdasarkan jabatan : | |
| | 1. Eselon II | 1 orang |
| | 2. Eselon III | 3 orang |
| | 3. Eselon IV | 3 orang |
| | b. Pejabat Fungsional | 5 orang |
| | c. Staf (termasuk CPNS) | 16 orang |
| | Jumlah pegawai (PNS, CPNS) berdasarkan pendidikan : | |
| | a. Pasca Sarjana (S – 2) | 5 orang |
| | b. Sarjana | 16 orang |
| | c. D3 | 6 orang |
| | d. SMA | 1 orang |
| | Jumlah pegawai (PNS, CPNS) berdasarkan golongan : | |

| | | |
|----|--|----------|
| | a. IV | 4 orang |
| | b. III | 19 orang |
| | c. II | 5 orang |
| B. | Jumlah pegawai PPPK | |
| | Jumlah pegawai PPPK berdasarkan golongan : | |
| | a. Golongan III | 13 orang |
| | b. Golongan II | 6 orang |
| | c. Golongan I | 11 orang |
| C. | Jumlah pegawai PPPK Paruh waktu | 4 orang |
| D. | Jumlah tenaga non ASN sebagai tenaga outsourcing | 17 orang |

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--|---|
| 1 | Tanah | 3 lokasi, total seluas 21.740 m2 |
| 2 | Gedung dan bangunan | 23 unit |
| 3 | Alat-alat angkutan/transportasi | Kendaraan - roda 4 : 8 unit - roda 2 : 40 unit - roda 3 : 3 unit |
| 4 | Peralatan dan mesin (non transportasi) | 645 Unit |
| 5 | Peralatan dan mesin (ekstrakomptabel) | 530 Unit |
| 6 | Jalan, irigasi, jaringan | 12 unit |
| 7 | Jaringan/aplikasi/website | 3 website |

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Sarana Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <https://dkp.kendalkab.go.id> dan email: dkp.kendalkab@gmail.com, serta akun Instagram *dinas_kelautan_dan_perikanan* Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kendal.



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.346 postingan 4.174 pengikut 107 mengikuti

Akun Resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

dkp.kendalkab.go.id/



Diikuti oleh heru_kdl, cak_hirin, dan 6 lainnya

Mengikuti Kirim Pesan



Gambar 1.3

Tampilan Website dan media sosial Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis organisasi dan permasalahannya, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan rencana strategis, rencana kerja, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis kinerja yaitu uraian tentang capaian kinerja organisasi, analisis kinerja, realisasi anggaran, keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.

Lampiran – lampiran

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Lalu

Berdasarkan Surat Bupati Kendal Nomor 000.8.6.3/429/Insp tanggal 4 November 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2024, maka telah ditindaklanjuti oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel 1.3

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2024

| No | Saran/Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|---|--|
| 1 | Konsistensi indikator kinerja dan target kinerja dalam perencanaan kinerja mulai dari Cascading, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja sampai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai indikator kinerja individu | Penyusunan indikator kinerja dan target kinerja dalam perencanaan kinerja mulai dari Cascading, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja sampai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai indikator kinerja individu telah disesuaikan sesuai dengan RPJM dan Renstra PD |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Menjabarkan dan mengevaluasi faktor pendorong dan penghambat atas capaian kinerja setiap triwulan | Capaian kinerja setiap triwulan telah dilakukan penjabaran akan faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja |
| 3 | Kepala Perangkat Daerah diharapkan selalu terlibat dalam evaluasi capaian kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dan merumuskan kebijakan guna tindak lanjut atas data kinerja yang dipaparkan dalam pelaksanaan optimalisasi pencapaian target kinerja sesuai Rencana Aksi yang telah ditetapkan | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selalu terlibat dalam evaluasi capaian kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dan merumuskan kebijakan guna tindak lanjut atas data kinerja yang dipaparkan dalam pelaksanaan optimalisasi pencapaian target kinerja sesuai Rencana Aksi yang telah ditetapkan |
| 4 | Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan dan pengolahan data sehingga data dari pelaksanaan kegiatan dan program dapat dirumuskan dalam mendukung capaian indikator | SOP pengumpulan dan pengolahan data telah diperbaiki dan ditetapkan agar data dari pelaksanaan kegiatan dan program dapat dirumuskan dalam mendukung capaian indikator |
| 5 | Menyusun Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan menjadikan rekomendasi sebagai dasar perbaikan akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah | Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) telah disusun dan dilaksanakan agar guna perbaikan akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah |
| 6 | Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut di perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah | Telah dirumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan mengacu pada Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2021-2026.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal yang mencakup tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Perencanaan kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta visi dan misi Kepala Daerah.

Visi

Visi Kepala daerah adalah :

“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul, (3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

2. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0

3. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

4. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan;

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam upaya menyukseskan tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal. Adapun misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah misi ke-satu yaitu ***“Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)”***.

Terkait dengan upaya pencapaian visi, maka misi yang ada tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran daerah. Tujuan yang harus mendapat dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan adalah ***“Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal”***. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah ***“Meningkatkan kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.”***.

Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, serta dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus selaras dengan kebijakan makro pembangunan kelautan dan perikanan nasional maupun Provinsi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal selama Tahun 2021–2026, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan;

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil produksi perikanan
2. Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | Kondisi Awal | | Target Kinerja | | | | |
|-----|---|--|---|--------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan | Meningkat-nya hasil produksi perikanan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota (kg) | 26.310.557 | 27.329.687 | 28.186.222 | 29.073.233 | 29.991.244 | 30.941.807 | 31.925.497 |
| | | Meningkat-nya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai SAKIP | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 72,55 | 75,66 | 77,55 | 80,1 |

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD Kabupaten Kendal yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi sektor perikanan melalui penguatan kapasitas kelompok usaha perikanan melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan;
- b. Meningkatkan kualitas Tempat Pelelangan Ikan melalui perbaikan manajemen pengelolaan dan perbaikan sarana prasarana;
- c. Meningkatkan kualitas penanganan pasca panen dan olahan hasil perikanan.
- d. Meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, dan layanan umum dan kepegawaian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi perikanan diprioritaskan melalui pemberdayaan pelaku usaha perikanan, penguatan kelompok, dan pendampingan fasilitasi usaha;
- b. Perbaikan manajemen pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan sarana prasarana;
- c. Peningkatan kualitas produksi perikanan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan SDM pengolahan hasil perikanan;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi, pemenuhan kebutuhan keuangan, layanan umum, kepegawaian, dan sarana prasarana fasilitas kantor.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Anggaran Penetapan 2025

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan pada anggaran penetapan Tahun 2025 telah menyusun rencana pelaksanaan 4 program terdiri dari 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan jumlah total belanja Rp. 17.067.129.336,- terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi Rp. 11.950.744.586,-
- 2) Belanja Modal Rp. 5.116.384.750,-
- 3) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,-
- 4) Belanja Transfer Rp. 0,-.

Rincian anggaran berdasarkan sumber dana sebagai berikut :

- 1) DAU Rp 13.743.777.336,-
- 2) PAD Rp. 1.611.852.000,-
- 3) DBHCHT Rp. 100.000.000,-
- 4) Dana Insentif Fiskal Rp. 1.161.500.000,-
- 5) Dana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Rp. 450.000.000,-

Program yang dilaksanakan meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Jumlah anggaran per program sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 8.645.960.661,- (16 sub kegiatan)
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp. 7.015.320.000,- (6 sub kegiatan)
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp. 911.017.500,- (5 sub kegiatan)
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 494.831.175 - (2 sub kegiatan)

Perubahan Anggaran 2025

Pada tahap pelaksanaan anggaran penetapan Tahun 2025, tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan baik output maupun outcome. Hal ini dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yakni adanya pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah, dan menginstruksikan Bupati/Walikota untuk :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Dampak dari regulasi tersebut, banyak program kegiatan yang belum dapat terlaksana, kecuali kegiatan yang bersumber dana dari *earmark*. Kegiatan yang dapat dilaksanakan terbatas hanya pada kegiatan rutin penyediaan administrasi perkantoran seperti listrik, air, maupun perlengkapan kantor rutin lainnya. Maka pada perubahan anggaran, Dinas Kelautan dan Perikanan secara akumulasi jumlah anggaran malah berkurang. Struktur anggaran terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan menjadi Rp. 11.421.146.927,- terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi Rp. 11.950.744.586,-
- 2) Belanja Modal Rp. 5.116.384.750,-
- 3) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,-
- 4) Belanja Transfer Rp. 0,-

Rincian anggaran berdasarkan sumber dana sebagai berikut :

- 1) DAU Rp 7.653.051.977,-
- 2) PAD Rp. 1.611.852.000,-
- 3) DBHCHT Rp. 100.000.000,-
- 4) Dana Insentif Fiskal Rp. 1.161.500.000,-
- 5) Dana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Rp. 450.000.000,-
- 6) Silpa Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun sebelumnya Rp 4.742.950,-
- 7) Dana Bagi Hasil Provinsi Rp. 440.000.000,-

Rincian anggaran per program menjadi sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp.. 7.753.738.227,-
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp. 2.355.831.950,-
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp. 1.114.301.500,-
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 197.275.250,-

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan sebagian besar di Kabupaten Kendal baik lokasi perikanan darat dan di pesisir pantai sepanjang 42,6 km yang membujur dari timur ke barat, dan sebagian besar dari masyarakat yang mendapatkan program dan kegiatan yaitu masyarakat pembudidaya ikan, nelayan di pesisir pantai, pengolah hasil perikanan, masyarakat dan kelompok wanita nelayan. Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan tersebar di 5 titik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Kendal, yang meliputi TPI Tawang (Rowosari), TPI Sendang Sikucing (Rowosari), TPI Tanggulmalang (Patebon), TPI Bandengan (Kendal), TPI Karangsari (Kendal). Kegiatan penyediaan benih ikan juga telah

diupayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Balai Benih Ikan (BBI) yang terletak di Desa Purwogondo Kecamatan Boja, dimana benih yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan benih bagi pembudidaya di Kabupaten Kendal maupun luar Kabupaten.

Secara rinci program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2025

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|-------|--|---|---------------|---------------|
| 1 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Produksi perikanan tangkap | 4.620.233 Kg | 2.355.831.950 |
| 1.1 | <i>Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i> | <i>Produksi perikanan tangkap</i> | 4.620.233 Kg | 1.670.467.950 |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia | 1 dokumen | 17.061.000 |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 1 unit | 847.110.000 |
| 1.1.3 | Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 70 unit | 806.296.950 |
| 1.2 | <i>Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah nelayan yang diberdayakan</i> | orang | 464.386.000 |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 240 orang | 461.206.000 |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 5 kelompok | 3.180.000 |
| 1.3 | <i>Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i> | <i>Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan TPI</i> | 82 | 220.978.000 |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan : Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 625 layanan | 220.978.000 |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Produksi perikanan budidaya | 24.453.000 Kg | 1.114.301.500 |
| 2.1 | <i>Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i> | <i>Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan</i> | 305 orang | 678.435.000 |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan | 5 kelompok | 2.760.000 |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|----------------------|
| | Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | | |
| 2.1.3 | Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 44 kelompok | 675.675.000 |
| 2.2 | <i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i> | <i>Terfasilitasinya sarana prasarana perikanan budidaya</i> | 10 paket | 435.866.500 |
| 2.2.2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 unit | 312.500.000 |
| 2.2.3 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 12 dokumen | 24.426.500 |
| 2.2.4 | Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 unit | 98.940.000 |
| 3 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Angka Konsumsi Ikan | 35,8 kg/kapita/tahun | 197.275.250 |
| 3.1 | <i>Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i> | <i>Jumlah data harga ikan di pasar di wilayah kabupaten Kendal</i> | 48 data | 100.910.000 |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | 48 dokumen | 100.910.000 |
| 3.2 | <i>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i> | <i>Jumlah masyarakat yang memahami mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan</i> | 80 orang | 96.365.250 |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 2 pelaku usaha | 96.365.250 |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100 persen | 7.753.738.227 |
| 4.1 | <i>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas</i> | 11 dokumen | 824.598.000 |
| 4.1.1 | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dokumen | 649.540.00 |
| 4.1.2 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 laporan | 4.218.000 |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|------------------|
| 4.1.3 | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 laporan | 170.840.000 |
| 4.2 | <i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah</i> | 12 bulan | 4.768.503.782 |
| 4.2.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 orang/bulan | 4.768.503.782 |
| 4.4 | <i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah</i> | 12 bulan | 721.566.445 |
| 4.4.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 40.535.500 |
| 4.4.2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 paket | 18.436.600 |
| 4.4.3 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 paket | 15.960.000 |
| 4.4.4 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 6 paket | 216.960.000 |
| 4.4.6 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 laporan | 425.249.345 |
| 4.4.7 | Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 670 dokumen | 4.425.000 |
| 4.5 | <i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah</i> | 12 bulan | 20.000.000 |
| 4.4.1 | Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 paket | 20.000.000 |
| 4.6 | <i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i> | 12 bulan | 1.195.795.000,00 |
| 4.6.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 6.500.000 |
| 4.6.2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 151.025.000 |
| 4.6.3 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 30.950.000 |
| 4.6.4 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1.007.320.000, |
| 4.7 | <i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik dan siap pakai</i> | 100 persen | 223.275.000 |
| 4.7.1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 unit | 152.450.000 |

| | | | | |
|-------|--|---|--------|----------------|
| 4.7.3 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 unit | 64.725.000 |
| 4.7.3 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 6.100.000 |
| | JUMLAH | | | 13.645.208.014 |

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan salah satu bagian dari tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025

antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dengan Bupati Kendal untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

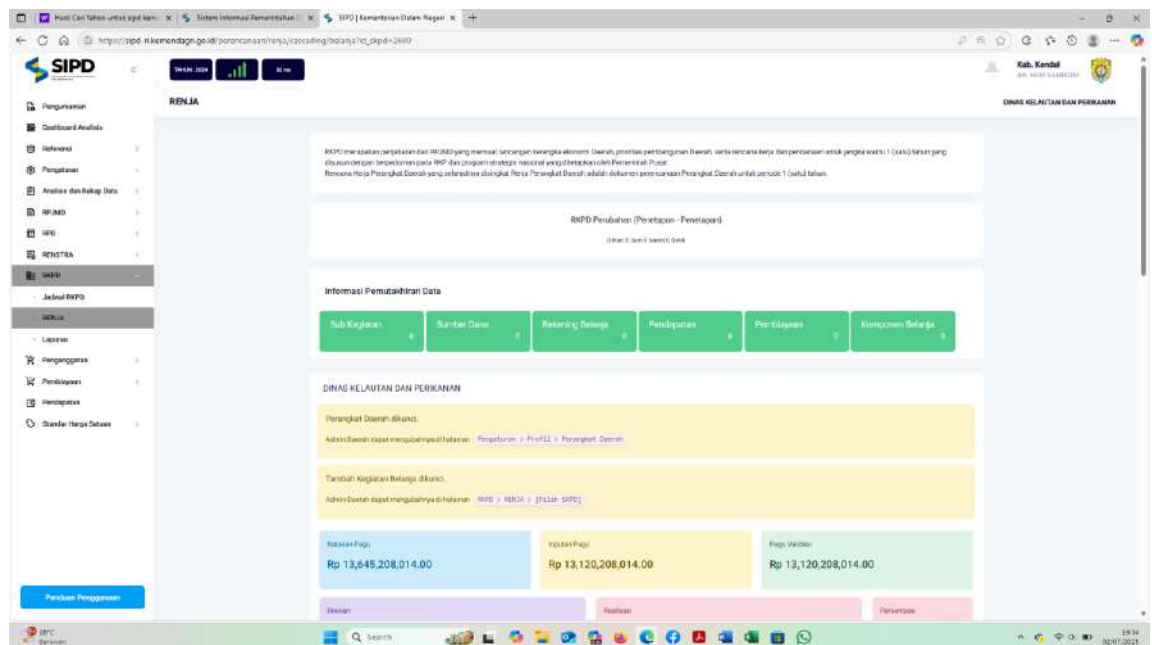
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | Target Kinerja 2025 |
|---|---|---|------------------------|
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan | Meningkatnya hasil produksi perikanan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota (kg) | 30.941.807 Kg |
| | Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai SAKIP | 77,55 |

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

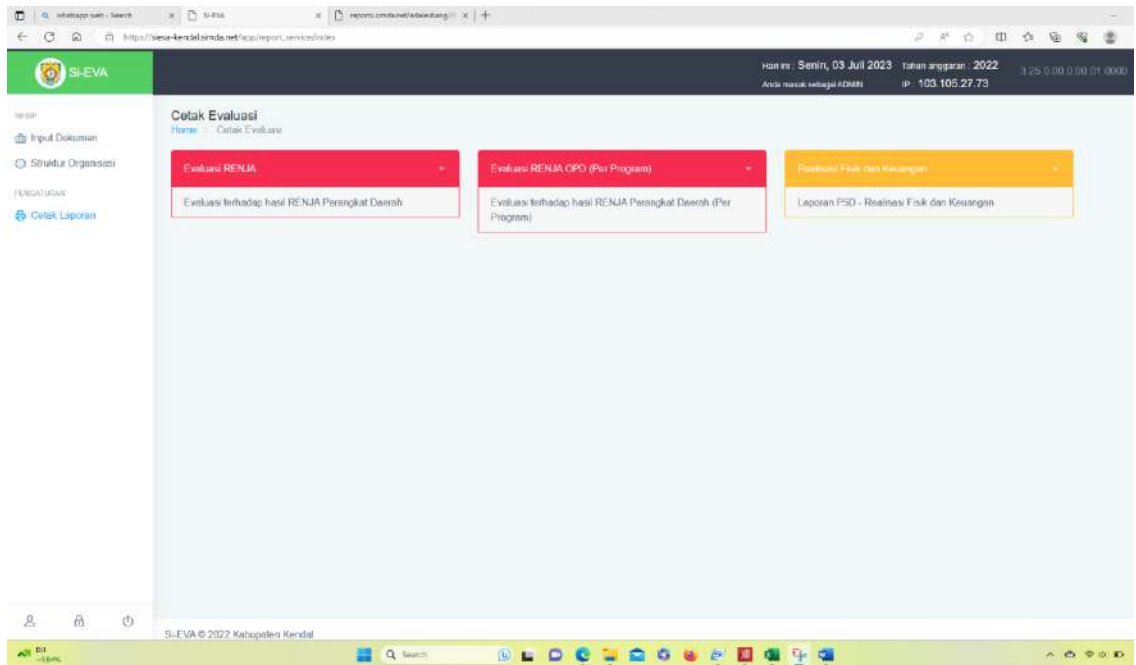
Guna mendukung capaian kinerja organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal secara aktif memanfaatkan teknologi informasi diantaranya :

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri



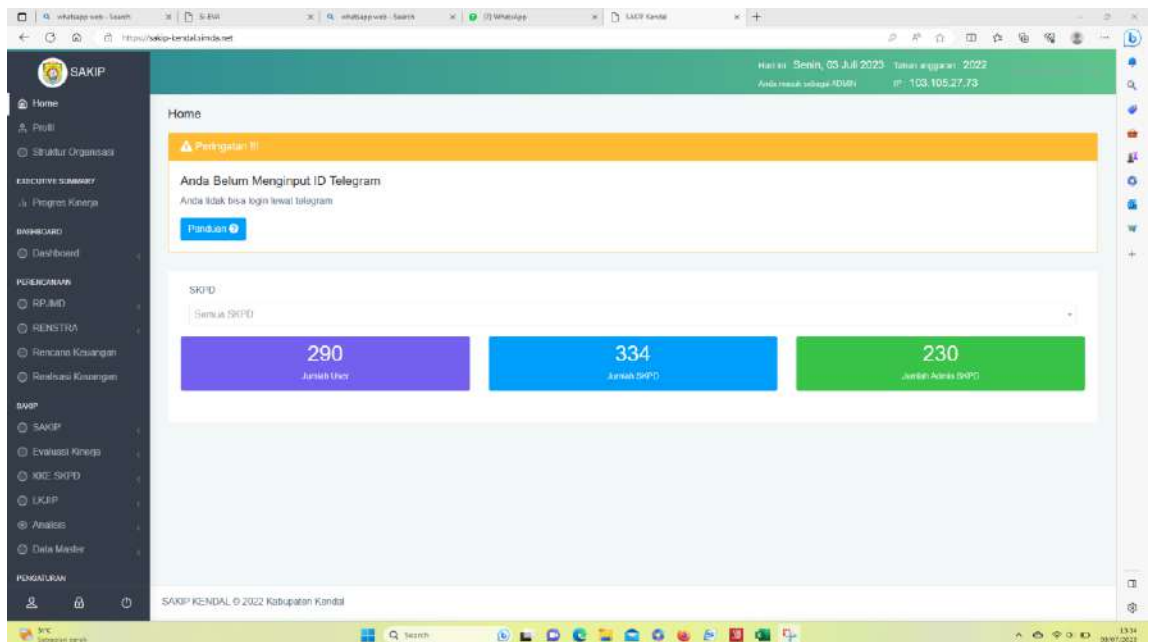
Gambar 2.1
Tampilan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

2.5.2. Sistem Evaluasi Kegiatan (SI-EVA)



Gambar 2.3
Tampilan Sistem Evaluasi Kegiatan (SI-EVA)

2.5.3. e-SAKIP



Gambar 2.4
Tampilan e-SAKIP

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan ini digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis 2021–2026. Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| No | Skala Pencapaian Kinerja | Kategori |
|----|--------------------------|---------------|
| 1 | > 91 % | Sangat tinggi |
| 2 | 76 – 90,99% | Tinggi |
| 3 | 66 – 75,99% | Sedang |
| 4 | 51 – 65,99% | Rendah |
| 5 | < 50% | Sangat Rendah |

Pada Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, terdapat 2 sasaran strategis dan 2 indikator sasaran. Secara total untuk pencapaian sasaran pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 mencapai 92%. Pencapaian tersebut masuk pada kategori *Sangat Tinggi*, rincian capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | |
|---------------|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | Target | Realisasi | % capaian |
| 1. | Meningkat-nya hasil produksi perikanan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota (kg) | 30.941.807 Kg | 14.542.383 Kg | 47 |
| 2. | Meningkat-nya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai SAKIP | 77,55 | 72,15 | 93 |
| Total capaian | | | | | 70 |

3.1.1. Analisa Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, terdapat Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka telah ditentukan 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2025, yaitu:

1. Sasaran Strategis-1 : Meningkatnya hasil produksi perikanan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis-1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

- B. Perbandingan Capaian/Realisasi Kinerja Sasaran strategis ke-1 Tahun 2025 dengan target kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| No | Sasaran Strategis ke-1 | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | | Kategori |
|----|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1. | Meningkat-nya hasil produksi perikanan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota | 30.941.807 Kg | 14.542.383 Kg | 47 | Sangat Rendah |

Analisis capaian kinerja Sasaran Strategis ke-1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota bahwa persentase capaian

pada Tahun 2025 hanya tercapai 47%. Pencapaian tersebut termasuk pada kategori *Sangat Rendah*. Capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan target Tahun 2025 adalah jumlah total produksi perikanan tercapai sebesar 14.542.383 kg atau 47% dari target sebesar 30.941.807 kg. Berdasarkan tabel data capaian, dapat dilihat bahwa Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) belum mencapai target yang ditetapkan dan kategori capaian sangat rendah.

Produksi perikanan diukur dari penjumlahan beberapa jenis sumber perolehan hasil tangkapan maupun budidaya sebagai berikut :

- a. Produksi ikan di Tempat Pelelangan Ikan, yang terdapat di 5 lokasi yaitu 1) TPI Tawang berlokasi di Desa Gempolsewu Kec Rowosari; 2) TPI Sendangsikucing berlokasi di Desa Sendangsikucing Kecamatan Rowosari; 3) TPI Tanggulmalang berlokasi di Desa Korowelangkulon Kec Cepiring; 4) TPI Bandengan berlokasi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal; 5) TPI Karang Sari berlokasi di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal.
- b. Produksi ikan non pelabuhan, merupakan produksi ikan oleh para nelayan yang tidak menjual hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan.
- c. Produksi ikan di perairan umum daratan, merupakan jumlah produksi ikan yang dilakukan oleh para pencari ikan ataupun nelayan yang dilakukan di perairan umum daratan seperti sungai, waduk, rawa, embung, dan perairan umum daratan lainnya.
- d. Produksi ikan di kolam, merupakan produksi ikan yang dihasilkan dari usaha budidaya yang dilakukan pada umumnya dalam skala kecil baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan dan berlokasi di sekitar tempat tinggal pembudidaya ikan
- e. Produksi ikan di tambak, merupakan produksi ikan yang dihasilkan dari usaha budidaya yang dilakukan di tambak air payau (pesisir), dan biasanya merupakan usaha utama pembudidaya yang dilakukan dengan skala usaha yang lebih besar.

Dari 5 jenis sumber perolehan hasil tangkapan maupun budidaya ikan, hanya perairan umum daratan yang mengalami kenaikan produksi sebesar 7,3%. Sedangkan produksi ikan pada sumber jenis perolehan yang lain mengalami penurunan. Produksi ikan di TPI mengalami penurunan 20,9%, non pelabuhan mengalami penurunan 16,8%, kolam mengalami penurunan 14,3%, dan tambak mengalami penurunan 59,5%.

Secara agregat jumlah produksi ikan di tambak Tahun 2025 masih memiliki persentase terbesar dalam produksi ikan yaitu 44% dari total produksi ikan, dan di bawahnya berturut-turut adalah produksi ikan di Tempat Pelelangan

Ikan 20,7%, produksi ikan di kolam 19,9%, produksi ikan non pelabuhan 12,1%, dan terakhir produksi ikan di perairan umum daratan 3,4%. Dari data tersebut terlihat bahwa produksi perairan umum daratan kontribusinya terhadap produksi ikan secara total sangat rendah sehingga walaupun mengalami kenaikan tapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi ikan secara total.

Tabel 3.4
Produksi Ikan di Kabupaten Kendal sesuai Tempat Produksi Ikan

| No | Tempat Produksi Ikan | Tahun 2025 (Kg) | % Produksi Terhadap Jumlah Total |
|----|---|-----------------|----------------------------------|
| 1. | Produksi ikan di Tempat Pelelangan Ikan | 3.003.117 | 20,7 |
| 2 | Produksi ikan non pelabuhan | 1.758.836 | 12,1 |
| 3 | Produksi ikan di perairan umum daratan | 490.320 | 3,4 |
| 4 | Produksi ikan di kolam | 2.891.560 | 19,9 |
| 5 | Produksi ikan di tambak | 6.398.550 | 44,0 |
| | JUMLAH | 14.542.383 | 100,0 |

Dikarenakan besarnya kontribusi produksi ikan di tambak, maka jika dinamika perubahan ekosistem tambak akan sangat mempengaruhi jumlah produksi secara keseluruhan. Apabila dianalisa lebih dalam bahwa tidak tercapainya produksi ikan di tambak disebabkan antara lain :

1. Semakin menurunnya luas tambak di wilayah pesisir Kabupaten Kendal. Penurunan luas tambak pada Tahun 2025 dibanding Tahun 2024 sebesar 914,53 Ha atau 35,08%.

Tabel 3.5
Luas Tambak di Kabupaten Kendal

| No | Kecamatan | Luas Tambak Tahun 2024 (Ha) | Luas Tambak Tahun 2025 (Ha) | Kenaikan/ Penurunan | |
|----|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| | | | | Ha | % |
| 1 | Kaliwungu | 1.256,11 | 253,63 | -1.002,48 | -79,81 |
| 2 | Brangsong | 228,85 | 240,59 | 11,74 | 5,13 |
| 3 | Cepiring | 185,45 | 134,50 | -50,95 | -27,47 |
| 4 | Patebon | 260,93 | 283,31 | 22,38 | 63,0 |
| 5 | Kendal | 421,64 | 446,86 | 25,22 | 8,58 |
| 6 | Rowosari | 44,40 | 92,96 | 48,56 | 109,36 |
| 7 | Kangkung | 209,50 | 240,50 | 31,00 | 14,80 |
| | Jumlah | 2.606,88 | 1.692,35 | -914,53 | -35,08 |

Penurunan luas tambak terjadi di kecamatan Kaliwungu dan Cepiring. Di Kecamatan kaliwungu penyebab utama penurunan luas lahan tambak karena terjadinya alih fungsi lahan untuk kawasan industri yang mana setiap

tahun semakin banyak tambak yang dijadikan pabrik, karena Kecamatan Kaliwungu merupakan pusat Kawasan Industri Kendal (KIK) bahkan telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tambak yang masih ada dan masih memungkinkan untuk budidaya, masih tetap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya ikan. Aktivitas tersebut akan terhenti dengan sendirinya apabila dilaksanakan pembangunan pabrik baru oleh pengelola KIK. Sedangkan di Kecamatan Cepiring, penurunan luas tambak disebabkan beberapa lahan tambak tidak produktif karena tidak dilakukan budidaya oleh pemilik tambak. Selain itu juga pada lokasi tambak di dekat pantai mengalami abrasi yang menyebabkan tanggul tambak rusak/hilang dan tambak terendam air laut.

Akan tetapi selain penurunan, pada beberapa kecamatan selain Kaliwungu dan Cepiring terdapat penambahan luas tambak karena adanya pemanfaatan lahan sawah idle karena rob air laut sehingga tidak bisa ditanami komoditas pertanian dan oleh petani diubah untuk budidaya ikan air payau.

2. Tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan di tambak (terutama ikan bandeng) dan mahal nya harga pupuk urea di pasaran, sehingga pembudidaya memberikan pupuk sekedarnya/semampunya serta mengurangi kepadatan tebar benih maka produksi ikan bandeng juga berkurang. Hal ini terjadi karena kebijakan dari pemerintah pusat terkait regulasi pupuk bersubsidi yang hanya diperuntukkan kepada petani.
3. Harga pakan pabrikan (pelet) yang terus meningkat (mahal), sedangkan harga ikan bandeng tidak stabil (naik turun) karena tingginya ketergantungan pada bahan baku impor terutama jagung dan bahan sumber protein.
4. Harga udang vaname menurun drastis (terutama udang size besar) sehingga panen udang dilakukan walaupun ukuran masih relative kecil (panen di size 80-100 yang harganya stabil, padahal biasanya panen di size 30-40). Panen dengan ukuran yang relative kecil harganya lebih murah. Beberapa pengusaha udang vaname skala besar di Kecamatan Brangsong dan Kaliwungu menutup usaha akibat banjir dan turunnya harga udang.
5. Terjadi gagal panen akibat air pasang tinggi (rob) dan bencana banjir. Curah hujan tinggi terjadi pada bulan Januari-Februari 2025, terjadi beberapa kali banjir besar yang meluapkan air tambak.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten untuk mencapai indikator kinerja Sasaran Strategis ke-1 Jumlah Total Produksi

Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota dengan melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal antara lain :

I. Program pengelolaan perikanan tangkap, dengan indikator kinerja produksi perikanan tangkap target 5.093.807 kg, tercapai realisasi 5.252.273 kg pencapaian target 103,1%. Upaya pencapaian tersebut dengan melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, telah tercapai target kinerja kegiatan (a) terlaksananya pendataan statistik perikanan selama 12 bulan dengan jumlah laporan data statistik dari kecamatan sebanyak 240 laporan. Kegiatan penyediaan data statistik dilakukan untuk mengetahui jumlah produksi ikan yang ada di kabupaten Kendal sampai sejauh mana dampak dari hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan terhadap peningkatan produksi perikanan.

2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, telah tercapainya target kinerja kegiatan pelaksanaan (a) rehabilitasi TPI Bandengan dan Sendangsikucing dan (b) rehabilitasi jalan produksi untuk nelayan di Kelurahan Karang Sari Kec Kendal. Dengan telah terlaksananya rehab TPI maka diharapkan akan meningkatkan fasilitas pelelangan ikan di TPI dan meningkatkan nilai transaksi pelelangan ikan. Untuk rehabilitasi jalan produksi bahwa wilayah lokasi pekerjaan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan kondisi jalan akses untuk melaut sering mengalami banjir rob sehingga dengan adanya pekerjaan tersebut diharapkan dapat mengatasi banjir rob karena badan jalan sudah dinaikkan dan konsidi saat ini pekerjaan telah selesai dan jalan telah dikases oleh masyarakat.

3. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, telah tercapainya target kinerja kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan mesin kapal dan jaring penangkap ikan kepada nelayan kecil dengan lokasi sebagai berikut :

| NO | PENERIMA | JUMLAH | SPESIFIKASI |
|-----------|--|------------------|---|
| 1 | KUB TUNAS HARAPAN Kelurahan Bandengan Kec Kendal | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 2 | KUB MINA BAHARI Desa Pidodo Kulon Kec Patebon | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |

| | | | |
|----|--|------------------|---|
| 3 | KUB BINA USAHA Desa Pidodo Kulon Kec Patebon | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 4 | KUB HIU PUTIH Desa Korowelangkulon Kecn Cepiring | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 5 | KUB MEKARSARI JAYA Desa Sendangkulon Kec Kangkung | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 6 | KUB BERKAH SAMUDRA Desa Sendangkulon Kec Kangkung | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 7 | KUB AKAR LAUT Desa Gempolsewu Kec Rowosari | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 8 | KUB MANUNGGAL PRATAMA Desa Gempolsewu Kec Rowosari | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 9 | KUB KHODAM JAYA Desa Gempolsewu Kec Rowosari | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 10 | KUB GANDASULI Desa Gempolsewu Kec Rowosari | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 11 | KUB TAMBAH BERKAH Desa Sendang Sikucing Kec Rowosari | 6 Mesin Kapal | Kapasitas mesin 23 PK/24 HP, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar |
| 12 | KUB BANYU MILI Kelurahan Bandengan Kec Kendal | 10 Jaring | Jaring Multifilamen Milenium maks 4 inch; 10 ply |
| 13 | KUB BLORONG MAKMUR Desa Turunrejo Kec Brangsong | 10 Jaring | Jaring Multifilamen Milenium maks 4 inch; 10 ply |



Gambar 3.4 Kegiatan pemberian bantuan mesin kapal secara simbolis untuk nelayan kecil yang dilakukan oleh Bupati Kendal

- b) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, telah tercapainya target kinerja kegiatan (a) pemberian informasi iklim dan cuaca kepada 200 orang nelayan selama setahun untuk memberikan informasi yang akurat kepada nelayan keadaan iklim dan cuaca terutama di laut agar dapat diantisipasi lebih dini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat cuaca buruk, (b) telah terlaksananya Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai Gempur Rokok Ilegal di lingkungan Nelayan dalam hal ini dapat dilaksanakan secara luas kepada masyarakat khususnya nelayan kecil dengan peserta 60 orang nelayan di pesisir Kabupaten Kendal dan pelaku UMKM Pantai Indah Kemangi Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung. Serta pembuatan baliho dan pengecatan lambung kapal dengan tema Gempur Rokok Ilegal sebanyak 5 paket, serta (c) telah diterbitkannya surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Nelayan, sehingga tetap dapat membeli solar bersubsidi untuk mesin kapal di SPBU yang telah ditunjuk karena tanpa adanya rekomendasi tersebut tentunya permohonan akan di tolak oleh pihak SPBU.
- c) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- 1) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, telah tercapainya target kegiatan berupa pengelolaan TPI sebanyak 5 unit :
 1. TPI Tawang di Desa Gempolsewu Kec Rowosari
 2. TPI Sendangsikucing di Desa Sendangsikucing Kec Rowosari
 3. TPI Tanggulmalang di Desa Korowelangkulon Kec Cepiring
 4. TPI Bandengan di Kelurahan Bandengan Kec Kendal
 5. TPI Karang Sari di Kelurahan Karang Sari Kec Kendal



Gambar 3.8 Aktivitas penjualan ikan melalui pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tawang Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari

II. Program pengelolaan perikanan budidaya, dengan indikator kinerja produksi perikanan budidaya target 25.848.000 kg, tercapai realisasi 9.290.110 kg pencapaian target 40%. Program dan kegiatan telah dilakukan secara maksimal walaupun belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Upaya-upaya untuk mencapai target dengan melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

- 1) Pemberian Pendampingan Kemudahan, Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, telah tercapai target kinerja kegiatan terlaksananya pelatihan budidaya ikan air tawar dan/atau air payau bagi para pembudidaya ikan pembudidaya ikan sebanyak 520 orang pada komoditas lele, nila, dan udang. Pada pelatihan pembenihan lele peserta diajak ke Balai Benih Ikan Boja untuk melihat dan praktek secara langsung proses pembenihan ikan lele.



Gambar 3.10 Kegiatan pelatihan budidaya ikan lele dan penyerahan secara simbolis sarana budidaya ikan dalam ember (BUDAMBER) kepada peserta pelatihan

b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- 1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, telah tercapai target kinerja kegiatan terlaksananya rehabilitasi pagar dan atap kolam Balai Benih Ikan Boja. Rehabilitasi pagar sangat penting untuk dibangun guna menjamin keamanan aset BBI dan mengurangi kontaminasi pengaruh lingkungan terhadap proses budidaya pembenihan ikan. Dan rehab kolam juga diperlukan untuk menyempurnakan /memperbaiki kolam yang ada kerusakan.

Perbaikan diharapkan dapat menambah jumlah kolam yang laik fungsi dalam proses pembenihan untuk meningkatkan jumlah benih yang bisa dijual.

- 2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, telah terlaksananya pengelolaan Balai Benih Ikan Boja sebagai sarana penyediaan benih ikan bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Kendal dan terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan tambak dinas di Desa Turunrejo Kec Brangsong dengan pemeliharaan ikan bandeng sebanyak 1 kali periode (10.000 ekor benih).
- 3) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, telah terlaksananya (a) pemantauan hama dan penyakit ikan, kualitas air, obat ikan kimia biologi, pakan di 10 (c) pengujian sampel penyakit ikan di laboratorium (d) pengadaan ammonia test kit.

C. Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja, dan persentase capaian Tahun 2023, 2024, dan 2025

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

| No | Sasaran Strategis ke-1 | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----|---------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Meningkatnya hasil produksi perikanan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota (kg) | 28.186.222 Kg | 24.429.614 Kg | 84 | 29.991.244 Kg | 25.534.795 Kg | 85 | 30.941.807 kg | 14.542.383 | 47 |

Analisa perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis ke-1 dengan Tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota pada capaian kinerja Tahun 2025 apabila dibandingkan Tahun 2024 mengalami penurunan dimana pada Tahun 2025 tercapai 47% sedangkan Tahun 2024 tercapai 85%. Produksi ikan Tahun 2025 terealisasi 14.542.383 kg sedangkan Tahun 2024 terealisasi 25.534.795 kg atau turun 10.992.412 kg.

Tabel 3.7
Produksi Ikan di Kabupaten Kendal sesuai Tempat Produksi Ikan

| No | Tempat Produksi Ikan | Tahun 2024 (Kg) | Tahun 2025 (Kg) | % Kenaikan/ Penurunan |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Produksi ikan di Tempat Pelelangan Ikan | 3.794.237 | 3.003.117 | -20,9 |
| 2 | Produksi ikan non pelabuhan | 2.114.629 | 1.758.836 | -16,8 |
| 3 | Produksi ikan di perairan umum daratan | 456.829 | 490.320 | 7,3 |
| 4 | Produksi ikan di kolam | 3.372.860 | 2.891.560 | -14,3 |
| 5 | Produksi ikan di tambak | 15.796.240 | 6.398.550 | -59,5 |
| | JUMLAH | 25.534.795 | 14.542.383 | -43,0 |

Dari 5 jenis sumber perolehan hasil ikan baik dari tangkapan maupun budidaya ikan, hanya produksi ikan di perairan umum daratan yang mengalami kenaikan sedangkan jenis tempat produksi lainnya mengalami penurunan.

Tabel 3.8
Produksi Ikan di Tambak per Jenis Ikan

| No | Jenis Ikan | Tahun 2025 (Kg) | % Produksi Terhadap Jumlah Total |
|----|---|-----------------|----------------------------------|
| 1. | Bandeng | 9.361.000 | 59,1 |
| 2 | Udang Windu | 314.820 | 2,0 |
| 3 | Udang Vanname | 1.124.500 | 7,1 |
| 4 | Nila | 330.300 | 2,1 |
| 5 | Lainnya (Udang putih, Udang api-api, Rumput laut, Kepiting) | 4.707.920 | 29,7 |
| | JUMLAH | 15.838.540 | 100 |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa produksi ikan di tambak didominasi oleh jenis ikan bandeng sebesar 59,1%, diikuti berturut-turut komoditas Lainnya (udang putih, udang api-api, rumput laut, kepiting) 29,7%, udang vanname 7,1%, nila 2,1%, dan terakhir udang windu 2,0%.

Tabel 3.9
Produksi Ikan di Tambak per Jenis Ikan Dibanding Tahun Sebelumnya

| No | Jenis Ikan | Tahun 2024 (Kg) | Tahun 2025 (Kg) | % Kenaikan/ Penurunan |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Bandeng | 9.823.700 | 9.361.000 | -14,7 |
| 2 | Udang Windu | 358.700 | 314.820 | -12,2 |
| 3 | Udang Vanname | 1.240.400 | 1.124.500 | -9,3 |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------|
| 4 | Nilai | 296.900 | 330.300 | 11,2 |
| 5 | Lainnya (Udang putih, Udang api-api, Rumput laut, Kepiting) | 4.022.920 | 4.707.920 | 17,0 |
| | JUMLAH | 15.689.400 | 15.838.540 | -1,0 |

Komoditas yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah ikan bandeng, udang windu, dan udang vanname. Persentase penurunan terbesar terjadi pada bandeng sebesar 14,7% dan penurunan terkecil produksi udang vanname sebesar 9,3%. Penurunan produksi ikan bandeng sangat dominan mempengaruhi jumlah produksi ikan di tambak karena kontribusinya mencapai 44%. Penurunan produksi terjadi karena berkurangnya luas tambak yang membudidayakan komoditas ikan tersebut maupun terkena dampak bencana alam banjir. Penurunan luas tambak selain karena alih fungsi lahan, dapat juga disebabkan pembudidaya ikan tidak menggarap lahan tambak karena harga yang tidak menentu atau mengganti dengan komoditas ikan lainnya, seperti terlihat dari data jumlah produksi ikan nila dan lainnya (Udang putih, Udang api-api, Rumput laut, Kepiting) mengalami kenaikan jumlah produksi.

- D. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2021-2026, yaitu :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2021-2026

| No | Sasaran Strategis ke-1 | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | Capaian 2025 | Target Akhir 2026 | Persentase Tingkat Kemajuan |
|----|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Meningkatnya hasil produksi perikanan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota | 14.542.383 Kg | 31.925.497 Kg | 45,5 |

Analisa perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota pada capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan target akhir pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan baru tercapai 45,5%. Walaupun realisasinya masih jauh dari target akhir Renstra akan tetapi Dinas Kelautan dan Perikanan tetap

berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target pada tahun-tahun mendatang.

- E. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan sasaran dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, yaitu :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1

| No | Sasaran Strategis ke-1 | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | 2025 | | | | | | Efisiensi Anggaran (%) |
|----|---------------------------------------|---|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| | | | Kinerja | | | Anggaran | | | |
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1. | Meningkatnya hasil produksi perikanan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota (kg) | 30.941.807 kg | 14.542.383 | 47 | Rp. 5.234.137.827 | Rp. 4.688.400.886 | 89,6 | 10,4 |

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Strategis ke-1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota dapat diuraikan sebagai berikut :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis ke-1 adalah sebesar Rp. 4.688.400.886,- atau 89,6% dari total pagu sebesar Rp. .234.137.827,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,4% dari pagu yang dianggarkan. Efisiensi/silpa penggunaan sumber daya tersebut disebabkan antara lain oleh :

1. Efisiensi dari lelang pengadaan barang/jasa terutama pengadaan dengan nilai yang besar
2. Tidak dilaksanakannya anggaran untuk penyediaan program KOTAKU.

- F. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis ke-1 Tahun 2025 antara lain :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 1.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

- 1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 1.2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 1.3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 2.1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan, Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
 - 2.2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 - 2.2.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 - 2.2.4. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Sasaran Strategis-2 : Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja Nilai SAKIP. Sebagaimana diketahui bahwa nilai SAKIP yang dipakai dalam laporan ini adalah nilai SAKIP Tahun 2024, hal ini karena SAKIP Tahun 2025 belum dilakukan evaluasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis-2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

- a. Perbandingan Capaian/Realisasi Kinerja Sasaran strategis ke-2 Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

| No | Sasaran Strategis ke-2 | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | Kategori |
|----|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1. | Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai SAKIP | BB 75,66 | BB 72,15 | 95,4 | Sangat Tinggi |

Berdasarkan hasil dokumen evaluais SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal terdapat beberapa komponen yang tidak dapat memperoleh nilai yang optimal. Beberapa hal yang menyebabkan tidak optimalnya nilai SAKIP antara lain perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah belum selaras dengan IKU OPD dan dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.

Berdasarkan hasil LHE SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal diperoleh penilaian nilai sebagai berikut :

Tabel 3.13
Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal
Tahun 2023

| No | Komponen/ Sub Komponen Kriteria | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|----|---|-------|-----------------------------|------------------|
| | | | Angka | Interpretasi |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 21,60 | BB (Sangat Baik) |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 21,60 | BB (Sangat Baik) |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,80 | BB (Sangat Baik) |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 18,15 | BB (Sangat Baik) |
| | Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal | | 72,15 | BB (Sangat Baik) |

- b. Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja, dan persentase capaian Tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 dengan Tahun-tahun
Sebelumnya

| No | Sasaran Strategis ke-2 | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai SAKIP | BB 72,8 | BB 71,2 | 97,8 | BB 72,5 | BB 72,0 | 99 | BB 75,6 | BB 72,1 | 95,4 |

Analisa perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis ke-2 dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa indikator Nilai SAKIP pada capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan Tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu target BB terealisasi BB, mengalami kenaikan terutama pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2021-2026.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 dengan Renstra Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2021-2026

| No | Sasaran Strategis ke-2 | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target Akhir 2026 | Persentase Tingkat Kemajuan |
|----|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai SAKIP | 75,66 | 78,5 | 95,4 |

Analisa perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa indikator Nilai SAKIP pada capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan target akhir pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan sudah tercapai 95,4% dengan predikat BB.

Walaupun target sampai akhir Renstra sudah tercapai yaitu BB, tapi secara nilai realisasinya belum sesuai target akhir Renstra, untuk itu seiring berjalannya waktu target tersebut akan terus diupayakan untuk dapat dicapai pada tahun-tahun mendatang.

- d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan sasaran dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, yaitu :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-2

| No | Sasaran Strategis ke-2 | Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja | 2025 | | | | | | Efisiensi Anggaran (%) |
|----|--|---|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | | Kinerja | | | Anggaran | | | |
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | |
| 1. | Meningkat-nya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan | Nilai SAKIP | BB 75,6 6 | BB 72,1 5 | 95,4 | Rp. 1.189.420.000 | Rp. Rp. 1.139.481.036 | 95,8 | 4,2 |

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Strategis ke-2 Nilai SAKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis ke-2 adalah sebesar Rp. .139.481.036,- atau 95,8% dari total pagu sebesar Rp. 1.189.420.000,-. Terdapat eisiensi anggaran makan minum rapat, perjalanan dinas, dan bahan bakar minyak. Efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,2% dari pagu yang dianggarkan.

- e. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis ke-1 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2. Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, pada Tahun Anggaran 2024, didukung dengan anggaran pada Penetapan APBD 2025 sebesar Rp. 17.067.129.336,- dan pada perubahan anggaran Tahun 2025 berkurang menjadi Rp. 11.421.146.927,- dengan komposisi anggaran sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi Rp. 11.950.744.586,-
- 2) Belanja Modal Rp. 5.116.384.750,-
- 3) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,-
- 4) Belanja Transfer Rp. 0,-

Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 10.806.980.805,-. Penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran adalah hanya di program prioritas (non-rutin/non-keseekretariatan). Apabila diperinci realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

| Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Persentase Realisasi |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| Meningkatnya hasil produksi perikanan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1.861.208.000 | 19.010.928 | 98,50 |
| | <i>Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i> | 477.300.000 | 19.719.100 | 4,69 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 19.300.000, | 19.010.928 | 98,50 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 420.700.000 | 19.719.100 | 4,69 |
| | Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 37.300.000 | 34.166.600 | 91,60 |
| | <i>Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | 1.259.798.000 | 1.218.218.654 | 96,70 |
| | Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 1.259.798.000 | 1.218.218.654 | 96,70 |
| | <i>Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i> | 124.110.000 | 123.015.004 | 99,12 |
| | Sub Kegiatan : Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 124.110.000 | 123.015.004 | 99,12 |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 3.372.929.827 | 3.274.270.600 | 97,07 |
| | <i>Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i> | 490.999.48 | 482.660.630 | 98,30 |
| | Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan | 490.999.487 | 482.660.630 | 98,30 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------|
| | Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| | <i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i> | 2.881.930.340 | 2.791.609.970 | 96,87 |
| | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12.370.000 | 9.710.000 | 78,50 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.414.155.000 | 2.349.383.316 | 97,32 |
| | Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 381.605.340 | 366.557.866 | 96,06 |
| | Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 73.800.000 | 65.958.788 | 89,38 |
| | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1.573.484.800 | 1.553.859.228 | 98,75 |
| | <i>Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i> | 28.571.000 | 26.480.450 | 92,68 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 28.571.000 | 26.480.450 | 92,68 |
| | <i>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i> | 190.760.000 | 187.543.310 | 98,31 |
| | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 190.760.000 | 187.543.310 | 98,31 |
| | <i>Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i> | 1.354.153.800 | 1.339.835.468 | 98,94 |
| | Sub Kegiatan : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.354.153.800 | 1.339.835.468 | 98,94 |
| Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.837.585.387 | 6.628.583.620 | 476 |
| | <i>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 1.189.420.000 | 1.139.481.036 | 95,80 |
| | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 682.820.000 | 667.075.000 | 97,69 |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.565.000 | 6.524.536 | 99,38 |
| | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 500.035.000 | 465.881.500 | 93,17 |
| | <i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 4.059.703.790 | 3.970.794.392 | 97,81 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.059.703.790 | 3.970.794.392 | 97,81 |
| | <i>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 80.675.000 | 533.524.174 | 91,45 |
| | Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 80.675.000 | 39.999.500 | 100,00 |
| | <i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 583.421.597 | 17.932.000 | 97,97 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------|
| Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40.000.000 | 18.750.000 | 93,14 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.303.200 | 89.137.700 | 99,26 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.130.000 | 362.964.974 | 88,43 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 89.800.000 | 4.740.000 | 100,00 |
| Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 410.448.397, | 853.748.891 | 98,88 |
| Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4.740.000 | 6.500.000 | 100,00 |
| <i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 863.400.000 | 128.490.077 | 93,41 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.500.000 | 14.680.000 | 99,80 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 137.550.000 | 704.078.814 | 99,92 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.710.000 | 131.035.127 | 92,51 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 704.640.000 | 95.507.826 | 90,49 |
| <i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 141.640.000 | 35.527.301 | 98,41 |
| Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 105.540.000 | 533.524.174 | 91,45 |
| Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 36.100.000 | 39.999.500 | 100,00 |
| JUMLAH | 13.645.208.014 | 12.870.843.734 | 94,33 |

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja maka perlu diukur tingkat capaian atau realisasi keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa anggaran yang digunakan pada tahun tertentu untuk mencapai target kinerja. Dari total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 11.421.146.927,- digunakan untuk membiayai 4 program terdiri dari 15 kegiatan dan 29 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal adalah sebesar Rp. 10.806.980.805,- atau 94,6% dari total pagu sebesar Rp. 11.421.146.927,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,4%.

3.3. Inovasi

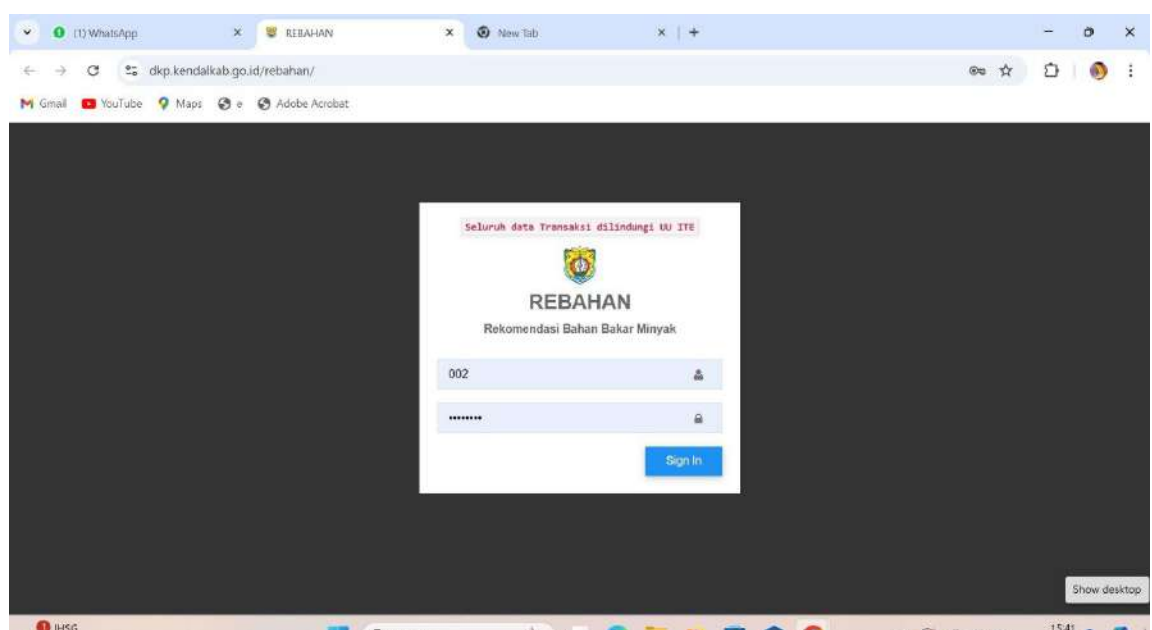
Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, antara lain :

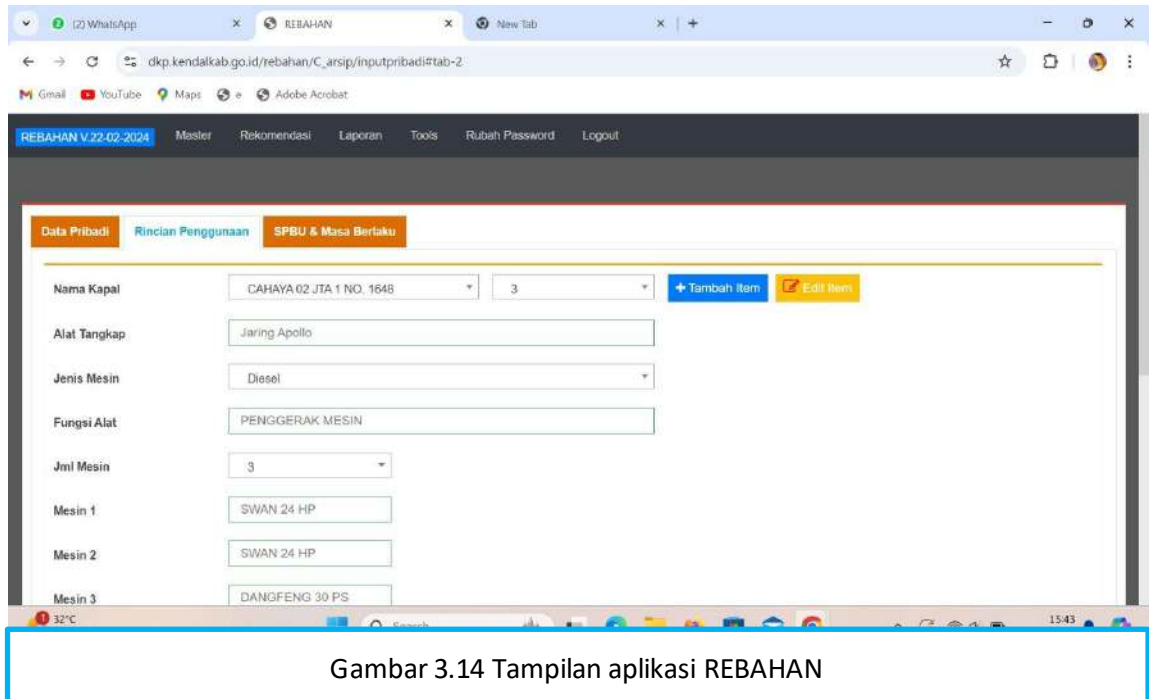
1. Teknologi Budidaya Udang Padat Tebar Tinggi Klaster Mini (BUPATI KAMI)

Merupakan pengembangan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan tambak dilakukan dengan meningkatkan padat penebaran disertai dengan pemberian akuinput yang memadai. Padat penebaran yaitu 200 ekor/m², diaplikasikan pada tambak dengan luasan 1.200 m² dengan kedalaman air 1,2 m dilengkapi dengan sistem aerasi berupa kincir dan root blower, pompa submersible, sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik(CBIB), serta sistem klaster skala mini. Klaster budidaya udang adalah pengelolaan usaha budidaya dalam satu kawasan dengan manajemen teknis dan usaha yang dikelola secara bersama dengan tujuan untuk meminimalisir kegagalan dan meningkatkan produktifitas dengan mengedepankan kelestarian lingkungan. Teknologi ini ditujukan untuk masyarakat terutama pembudidaya ikan yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan)

2. Aplikasi Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi untuk nelayan/pembudidaya ikan (REBAHAN)

Aplikasi ini dapat menjadi solusi terhadap hambatan di lapangan dalam mengakses surat rekomendasi BBM nelayan, terlebih lagi sekarang terjadi perubahan aturan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, yakni pemberian rekomendasi dari kelompok menjadi perorangan, dengan aplikasi ini sangat memudahkan nelayan karena tidak perlu repot-repot membawa berkas berulang-kali, seperti KTP, PAS kecil, atau KUSUKA sebagai syarat mendapat rekomendasi BBM bersubsidi, sebab sudah tersimpan di data base dalam aplikasi Rebahan. Ini merupakan langkah inovasi dari Pemkab Kendal untuk nelayan agar dapat mengakses BBM bersubsidi tanpa ribet dan berbelit-belit. Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan yang akan memohon rekomendasi pembelian BBM solar bersubsidi.





Gambar 3.14 Tampilan aplikasi REBAHAN

3. Pemanfaatan lahan idle untuk budidaya perikanan

Keberadaan Kabupaten Kendal di wilayah pantai utara pulau Jawa dimana banyak lahan yang mengalami kerusakan karena terkena rob pasang air laut sehingga lahan yang sebelumnya dapat ditanami sebagai lahan pertanian semakin lama semakin ditinggalkan oleh pemiliknya karena tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal karena kadar garam yang tinggi sebagai akibat naiknya air laut. Kondisi ini menyebabkan lahan terbenakalai dan mengalami rob yang semakin parah dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut diperparah dengan pemanasan global yang menaikkan permukaan air laut, sehingga kemungkinan untuk surut sangat sulit.

Oleh karena hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencoba di beberapa wilayah untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan budidaya ikan dengan komoditas ikan air payau. Upaya ini dimaksudkan untuk lebih memberikan nilai tambah bagi petani untuk memanfaatkan lahannya yang selama ini tidak dapat ditanami. Dengan semakin banyaknya lahan yang dimanfaatkan diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan terutama perikanan budidaya.

Hal ini sejalan dengan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat mengurangi penurunan produksi perikanan budidaya karena berkurangnya lahan budidaya yang beralih fungsi menjadi kawasan peruntukan industri.

4. Optimalisasi peran perempuan melalui usaha perikanan sistem BUDAMBER (budidaya ikan dalam ember)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran adalah para perempuan baik yang telah berumah tangga maupun yang belum untuk diberdayakan dalam memanfaatkan lahan di pekarangan rumah dengan budidaya ikan air tawar skala kecil.

Dalam pelaksanaan kegiatan menggandeng kelompok PKK di kabupaten maupun kecamatan. Selain diberikan pelatihan peserta juga mendapatkan sarana prasarana BUDAMBER seperti benih ikan, pakan, ember, obat-obatan, vitamin.

Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terciptanya swasembada pangan keluarga dan meningkatkan konsumsi protein hewani berasal dari ikan yang terbukti memiliki kandungan zat gizi yang baik pertumbuhan anak. Karena dapat diusahakan dengan skala kecil maka biaya yang dikeluarkan juga sangat terjangkau dengan hasil yang layak untuk kehidupan keluarga.

3.4. Penghargaan

Penghargaan yang diraih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan :

1. Penghargaan Top Inovasi Terpuji Peringkat 2 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025.



Gambar 3.15 Piagam Penghargaan Romantik dan Metadata sebagai Kontributor Data Sektoral Terbaik dengan Kategori Tepat waktu dan Responsif

2. Penghargaan Top 3 Besar Perangkat Daerah yang berkontribusi aktif dalam Program ASN peduli pekerja rentan, dimana semua ASN Dinas Kelautan dan Perikanan telah ikut berpartisipasi menanggung premi BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan.



Gambar 3.16 Piagam Penghargaan Kontribusi aktif dalam Program ASN peduli pekerja rentan

3. Penghargaan dari Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal atas kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan warga binaan dalam usaha bidang perikanan.



Gambar 3.16 Piagam Penghargaan dari Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dengan capaian kategori *Sangat Baik*. Capaian dari indikator kinerja 2 sasaran strategis secara keseluruhan pada tahun 2025 sebesar 92%. Dengan demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal telah dapat merealisasikan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari stakeholder secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan yang akuntabel dan transparan. Adapun capaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis ke-1 Meningkat-nya hasil produksi perikanan dengan indikator sasaran strategis Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 31.925.497 kg tetapi capaian sebesar 14.542.383 kg atau persentase capaian sebesar 45,5%.
2. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis ke-2 Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator sasaran strategis Nilai SAKIP telah tercapai BB(72,15) dari target BB(75,66) atau persentase capaian sebesar 95,4%.
3. Realisasi anggaran berdasarkan penyerapan anggaran belanja sebesar 10.806.980.805,- atau 94,6% dari total pagu sebesar Rp. 11.421.146.927,-. Hal ini berarti Tahun 2025 terdapat efisiensi penggunaan anggaran 5,4%.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP
 - a. Penyusunan indikator kinerja dan target kinerja dalam perencanaan kinerja mulai dari Cascading, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja sampai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai indikator kinerja individu telah disesuaikan sesuai dengan RPJM dan Renstra PD.
 - b. Capaian kinerja setiap triwulan telah dilakukan penjabaran akan faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja
 - c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selalu terlibat dalam evaluasi capaian kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dan merumuskan kebijakan guna tindak lanjut atas data kinerja yang dipaparkan dalam

pelaksanaan optimalisasi pencapaian target kinerja sesuai Rencana Aksi yang telah ditetapkan.

- d. SOP pengumpulan dan pengolahan data telah diperbaiki dan ditetapkan agar data dari pelaksanaan kegiatan dan program dapat dirumuskan dalam mendukung capaian indikator.
 - e. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) telah disusun dan dilaksanakan agar guna perbaikan akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah.
 - f. Telah dirumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Strategi untuk Peningkatan Kinerja
- a. Pemberian fasilitasi bantuan sarpras budidaya kepada kelompok pembudidaya ikan sebagai stimulus usaha, serta pemberian fasilitasi bantuan sarana perikanan tangkap kepada nelayan untuk mendukung stimulus usaha dan peremajaan sarana penangkapan ikan sudah banyak yang usang.
 - b. Meningkatkan pembinaan/pelatihan kepada pembudidaya ikan dalam inovasi budidaya untuk meningkatkan hasil produksi karena lahan tambak yang semakin berkurang, pemanfaatan lahan marginal untuk budidaya perikanan, penggunaan teknologi budidaya untuk meningkatkan kepadatan populasi dan produktivitas baik di kolam maupun di tambak
 - c. Meningkatkan kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum untuk meningkatkan produksi ikan di perairan umum.
 - d. Pembinaan/pelatihan kepada pembudidaya ikan tentang penanganan hama dan penyakit ikan, monitoring hama dan penyakit ikan secara rutin
 - e. Memperbaiki sarana prasarana Tempat pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal
 - f. Pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan/perbankan untuk meningkatkan skala usaha.
 - g. Monitoring dan evaluasi data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan program di masa yang akan datang.

Kendal, 2026
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KENDAL

drh. HUDI SAMBODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19720504199903100

